

---

## Diskusi Publik Virtual FPCI

### “Time for Decisive Action: Kontribusi Indonesia Dalam Perjuangan Perubahan Iklim Dunia”

Kamis, 11 Februari 2021

#### Pembicara

1. **Dyah Roro Esti Widya Putri**  
Anggota Komisi VII DPR-RI Bidang Energi, Riset dan Teknologi
2. **Dr. Nirarta “Koni” Samadhi**  
Country Director, World Resources Institute Indonesia (WRI)
3. **Barlev Nico Marhehe**  
Chief of Mission, United Nations Environmental Programme Indonesia (UNEP)
4. **Tiza Mafira**  
Associate Director, Climate Policy Initiative

#### Moderator

1. **Dr. Dino Patti Djalal**  
Pendiri & Ketua, Foreign Policy Community of Indonesia

#### Pembukaan oleh Moderator

Tahun ini bukanlah hanya tahun COVID-19, namun juga tahun perubahan iklim. Kita sudah melihat tanda-tandanya –Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Uni Eropa sebagai tiga kelompok negara penghasil emisi terbesar dunia, sudah bergerak dalam isu perubahan iklim. Kita akan melihat perubahan pesat dalam isu krisis perubahan iklim dari segi politik, diplomatik, ekonomi, dan teknologi. Oleh karenanya, tahun ini merupakan tahun yang strategis bagi umat manusia untuk menanggulangi pemanasan global.

Sekarang, suhu bumi telah naik rata-rata sekitar 0,9 derajat celsius. Jika tidak ada yang dilakukan, maka dalam beberapa dekade ke depan, kita akan berada di dunia dengan suhu bumi 3-4 derajat celsius. Hal tersebut akan menjadi malapetaka bagi kita semua. Dampaknya akan berpengaruh kepada segala aspek kehidupan manusia—baik dari segi persediaan pangan yang akan menurun, percepatan kepunahan yang dinamakan *the sixth extinction* (kepunahan spesies dan biodiversitas dalam skala besar), penyakit dan penyebaran virus yang akan bertambah, intensitas bencana alam yang meningkat, air laut yang akan naik, semakin banyaknya karang laut yang mati, stok air bersih yang akan menurun secara drastis, dan semakin banyaknya tempat di bumi yang tidak layak dihuni oleh manusia. Dan hal – hal tersebut belum menghitung dampak ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia.

Solusi terhadap masalah ini sudah ada. Semua negara menghitung emisinya dan masing-masing negara diminta untuk menurunkan produksi emisinya secara ambisius. Batas toleransi kenaikan suhu global adalah 1,5 derajat celcius. Oleh karenanya total emisi yang dihasilkan

---

banyak negara harus dikurangi agar suhu bumi tidak naik melebihi batas tersebut. Masalahnya, masih banyak negara di dunia yang masih santai, menganggap remeh, belum bertindak, bahkan tidak peduli dan terus melakukan pembangunan yang menghasilkan emisi tinggi. Jika perilaku ini kita pertahankan, kita tidak akan bisa menahan kenaikan suhu dibawah 1,5 derajat. Bahkan sekarang tanpa disadari perilaku kita tengah mengantar dunia kepada kenaikan suhu hingga 3-4 derajat celcius.

Indonesia, sebagai negara penghasil emisi terbesar ke-11, harus menjadi bagian dari solusi besar. Kita memiliki kepentingan besar terhadap isu pemanasan bumi dan posisi penting sebagai pemilik hutan tropis yang dapat menyerap karbon dioksida, sebagai bangsa maritim, dan sebagai ekonomi yang akan memasuki ekonomi lima terbesar di dunia dalam satu generasi kedepan. Kita harus menyadari dan meyakini bahwa bencana iklim akan menjadi ancaman terbesar bagi rakyat Indonesia.

Maka itu, kami akan mengajukan sebuah petisi di change.org yang berjudul, Yuk dorong Indonesia berperan aktif mengubah masa depan krisis iklim dunia! #SOSIklimDunia #MotherEarthNeedsYou. Petisi ini berisi permohonan yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan suara kepedulian terhadap masa depan Indonesia dan umat manusia terkait isu perubahan iklim. Isi petisi adalah sebagai berikut:

1. Segera menetapkan, sesuai kesepakatan Perjanjian Paris 2015, target penurunan emisi yang ambisius (apa yang dinamakan Nationally Determined Contribution atau NDC). Minimal 50% di tahun 2030, dan mencapai kondisi nol emisi atau carbon neutral di tahun 2050.
2. Segera secara serius menjalankan kebijakan nasional rendah emisi yang transformatif, yang didukung oleh kebijakan yang terkoordinir dan terukur di berbagai sektor dan semua kebijakan ini perlu dilakukan secara konsisten dan permanen.
3. Membuat program pembangunan Green Recovery pasca-COVID-19, dimana stimulus keuangan dapat diperbesar porsinya untuk membantu pengembangan inisiatif hijau pasca pandemi COVID-19, antara lain mengalokasikan pengeluaran stimulus untuk *nature-based solutions*, penghijauan hutan, dan pengelolaan hutan.
4. Agar Indonesia memainkan peranan aktif dalam berbagai rangkaian diplomasi iklim tahun ini yang akan berpuncak di perundingan PBB COP-26 di Glasgow, Skotlandia pada bulan November 2021. Jangan sampai Indonesia menjadi peserta pasif, apalagi berpangku tangan dalam agenda besar dan perjuangan historis umat manusia ini.

## Diskusi Panel

### Dr. Dino Patti Djalal:

- Dunia sedang menunggu Indonesia untuk mengumumkan target penurunan emisi yang baru karena target terdahulu Indonesia yakni 29% merupakan target penurunan emisi yang sudah kadaluarsa dan jauh lebih rendah dari negara lain. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pengumuman target penurunan emisi yang baru dari pemerintah?

---

**Ibu Dyah Roro Esti Widya Putri:**

- Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang besar dengan menandatangani Perjanjian Paris 2015. Itupun sudah diundangkan melalui UU No. 6 Tahun 2016 dengan komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca (emisi) sebesar 29%, dan 41% dengan bantuan internasional.
- DPR-RI Komisi 7 berkomitmen untuk merealisasikan target 23% Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025, dengan memonitor sektor energi melalui beberapa kebijakan energi nasional seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), UU 30 2007, dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, perjalanan Indonesia untuk mencapai target tersebut (23% EBT) masih jauh karena pada saat ini, Indonesia baru mencapai sekitar 11% EBT.
- Mencapai target EBT tersebut memerlukan kemauan politik yang sangat kuat; di dalam Komisi 7, ada berbagai macam fraksi yang perlu memiliki visi yang sama. Saya bersyukur bahwa seluruh anggota Komisi 7 mempunyai komitmen yang sama untuk merealisasikan transisi energi dari ekonomi yang didorong oleh industri energi batubara menjadi energi yang bersifat lebih ramah lingkungan.
- Kini, jika tidak ada eksplorasi yang signifikan bagi peningkatan stok migas secara nasional, maka cadangan minyak Indonesia akan semakin berkurang dalam waktu sembilan tahun ke depan.
- Industri migas merupakan industri dengan produk yang jumlahnya terbatas, ada sebuah tren dimana banyak perusahaan di dunia tidak lagi melabelkan diri mereka sebagai perusahaan minyak dan gas, namun sebagai perusahaan energi. Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwa dengan perkembangan isu-isu yang ada dan perubahan iklim, maka perusahaan migas perlu melakukan transisi. Sebagai contoh perusahaan seperti Pertamina menyadarkan pentingnya penerapan teknologi penangkapan karbon.
- Komisi 7 telah mendorong RUU EBT yang sudah masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Tujuan kami adalah untuk bisa menyelesaikan dan menyetujui RUU EBT tersebut pada bulan Oktober tahun ini.
- EBT harus bisa semakin kompetitif di dalam pasar energi nasional. Karena kini tampak EBT tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan energi tidak terbarukan, maka harus ada semacam payung hukum untuk bisa mengatur semua hal tersebut. Hanya sebesar 0,061% EBT yang terealisasikan dari seluruh potensi EBT yang Indonesia miliki, walaupun tingkat penggunaan energi terbarukan untuk energi nasional sudah 11%.
- Sebagai contoh dari segi harga, energi batubara yang berkisar 4-6 sen dolar AS per Kilowatt Hour (KWH) masih jauh lebih kompetitif dari pada EBT yang berkisar sekitar 7-11 sen dolar AS per KWH. Melalui RUU EBT, kami berharap dapat menyetarakan energi batubara dengan EBT dari segi harga. Saat ini, kami sedang mengkaji signifikansi dan relevansi dari penerapan inisiatif seperti pajak karbon agar dapat memperhitungkan eksternalitas negatif yang berkaitan dengan industri batubara, seperti kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan.
- Kami juga sangat terbuka untuk berdiskusi dengan publik mengenai RUU EBT agar mendapatkan masukan-masukan yang dapat membantu memonitor penerapan EBT di

---

Indonesia dan bermanfaat untuk seluruh sektor yang ada. Bahkan ada pembahasan mengenai perlunya memiliki suatu badan khusus di dalam industri EBT, seperti SKK dan BPH Migas di dalam industri Migas.

- Untuk bisa merealisasikan potensi EBT di Indonesia, harus ada komitmen lintas sektoral di antara pemerintah, parlemen hingga PLN. Kita terus mendorong PLN agar lebih tertarik untuk menuju kepada arah EBT dari segi listrik.

#### **Dr. Dino Patti Djalal:**

- Masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir memprioritaskan isu iklim, penurunan emisi, dan energi hijau masih terhitung sebagai minoritas. Hal ini berbeda dengan negara seperti Norwegia, dimana pola pikir seperti itu telah mendorong sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat Norwegia. Sedangkan Tiongkok, sebagai negara ekonomi dan produsen emisi terbesar di dunia, sudah menargetkan karbon netral pada tahun 2060. Apa yang harus kita lakukan untuk merancang NDC Indonesia yang lebih ambisius?

#### **Dr. Nirarta “Koni” Samadhi**

- Pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana yang cukup ambisius, yang disebut dengan Low Carbon Development Indonesia. Inisiatif tersebut memiliki tiga skenario: 1) skenario *business as usual*, 2) skenario tengah, dan 3) skenario ambisius.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kita mengadopsi skenario tengah, yang akan membawa kita memenuhi target NDC 29% pada tahun 2030, atau 41% jika dibantu oleh dunia internasional. Namun, sumbangan Indonesia dan negara lain yang sesuai dengan NDC saat ini tidak akan membawa dunia ke 1,5 derajat celsius, melainkan 3-4 derajat celsius. Maka itu, Indonesia harus lebih ambisius dengan mengikuti skenario ambisius pembangunan rendah karbon.
- Karena solusi dan rencananya sudah diformulasikan, kita hanya perlu memiliki dorongan dan kemauan politik untuk menerapkan skenario tersebut dengan cara yang lebih ketat. Sebagai contoh, Indonesia harus segera berhenti menggunakan energi batubara dan bertransisi kepada EBT. Dengan demikian, kita dapat mencapai target pada tahun 2050.

#### **Dr. Dino Patti Djalal**

- Seberapa genting situasi saat ini? Apakah betul-betul ada perubahan psikologis dan politik, terutama sejak Joe Biden menjadi Presiden AS, dan apakah ini akan membuat momentum terhadap isu iklim akan semakin mengencang?

#### **Bapak Barlev Nico Marhehe**

- Pada Laporan Emissions Gap dari UNEP di Desember 2020, kami menemukan bahwa penurunan emisi karbon diperkirakan di angka 7% pada tahun 2020, yang merupakan angka yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi.

- Walaupun perkembangan tersebut patut kita apresiasi, tetapi disayangkan perkembangan tersebut tidak *sustainable* dan hanyalah kejutan sesaat. Hal ini dikarenakan dorongan situasi pandemi.
- Perlu ada upaya yang lebih kuat lagi dari semua negara untuk menurunkan emisi karbon dengan lebih agresif. Karena perubahan iklim merupakan akumulasi kegiatan manusia selama bertahun-tahun. Pada akhir dekade ini, dunia masih akan mengarah kepada suhu yang mencapai 3-4 derajat celsius.
- Saya menyambut inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah, seperti Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang dikeluarkan Bappenas dan rancangan RUU EBT. Diharapkan melalui semua ini, kita dapat menerjemahkan ke langkah konkrit. Dari sisi UNEP, kami terus membantu dan mendorong upaya-upaya yang lebih baik.

### Dr. Dino Patti Djalal

- Kunci dari Green initiative adalah regulasi dan subsidi. Apakah kerangka regulasi kita cukup progresif? Apa yang dapat diperbaiki dari sisi regulasi?

### Ibu Tiza Mafira

- Ada kebijakan yang baik dan buruk, serta yang kontradiktif atau tumpang tindih. Ada kebijakan baik namun diperlemah oleh kebijakan lainnya.
- Kabar baiknya adalah Angka deforestasi di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun 5% dibanding 2018, dimana menjadi tahun ke-3 berturut-turut bahwa Indonesia mampu menekan angka kehilangan hutan primer. Hal ini dikarenakan sejak 2015, muncul penegakkan hukum yang lebih kuat, restorasi gambut, dan moratorium.
- Kabar buruknya adalah perlindungan hutan tersebut semakin lemah karena izin lingkungan dilemahkan menjadi persetujuan lingkungan yang belum jelas cara penegakan hukumnya. Ada upaya mendorong bank pangan tanpa memasang prinsip biodiversitas (bisa membuka peluang didorongnya mono-crop skala besar yang merusak lingkungan). Zona hijau yang tadinya wajib 30% sudah tidak ada lagi.
- Angka emisi kita pada saat ini masih fluktuatif di sekitar 9-12% dari target bauran EBT yang baik dan ambisius karena belum ada rencana jelas untuk *phasing out coal*. Maka, selama penggunaan EBT meningkat, energi batubara juga akan meningkat. Meskipun sudah ada kebijakan seperti tidak memberikan izin baru untuk pembangkit listrik batubara, tetapi tidak ada kebijakan untuk pensiunkan PLTU lama, yang sangat dapat dilakukan karena listrik di Jawa dan Bali sudah *over-capacity*.
- Sejak Indonesia mengajukan NDC yang pertama pada tahun 2016, sebenarnya ada banyak inisiatif-inisiatif baru seperti Peraturan Pemerintah (PP) dana lingkungan hidup, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai carbon pricing yang di dalamnya ada carbon tax, climate planning dalam alokasi negara, komitmen baru mobil listrik, dll. Namun, meskipun ada inisiatif-inisiatif baru tersebut dan Indonesia dapat menjadi lebih ambisius, mengapa status NDC tidak berubah menjadi lebih ambisius.

- Jika kita melihat NDC kita dengan lebih teliti, empat dari enam target penurunan emisi yang ada merupakan energi yang masih bergantung pada batubara, atau pembakaran yang menghasilkan emisi. Contohnya, SPBU listrik, dimana PLN sudah ditugaskan untuk memperbanyak SPBU listrik, tidak terwakili di dalam NDC, melainkan SPBG yang berbahan bakar gas. Di sektor sampah, NDC masih menyebut secara eksplisit pembangkit listrik tenaga sampah, yang menghasilkan emisi. Mobil listrik yang sudah ada kebijakannya tidak terwakili, melainkan biofuel-lah yang didorong di dalam NDC tersebut. NDC masih menyebut secara eksplisit clean coal energy, yang merupakan teknologi yang masih menghasilkan emisi; tetapi, teknologi dengan nol emisi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam NDC.
- Masalahnya, ketika investasi sudah dikunci untuk teknologi-teknologi dengan emisi yang lebih bersih seperti di dalam NDC, maka EBT, yang tidak terwakilkan, akan menjadi sulit untuk bersaing. Alhasil, akan semakin sulit bagi Indonesia untuk menuju nol emisi.
- Padahal, potensi di Indonesia yang paling besar adalah EBT, khususnya Solar PV (Photovoltaics), yaitu dengan potensi 200,000 megawatt. Namun, penggunaannya baru 0,04%. Sedangkan, di negara lain, Solar PV justru yang menjadi idaman dan champion karena sudah lebih murah daripada batubara.

### **Ibu Dyah Roro Esti Widya Putri**

- Hal yang diperlukan sekarang adalah komitmen lintas sektoral, yang masih menjadi proses berjalan dan diperjuangkan agar ada keseimbangan dan kesatuan dan tidak ada kebijakan-kebijakan yang merugikan RUU EBT. Saat ini, sedang ada kemauan politik untuk mendorong adanya EBT di Indonesia. Namun, masih saja diberi kelonggaran dalam penggunaan batubara di Indonesia, dan bahkan ditingkatkan.
- Adalah betul bahwa ada beberapa target penurunan emisi yang tentu tidak berkaitan dengan teknologi nol emisi. Hal ini patut kita dorong melalui beberapa mitra kerja terkait penyusunan NDC tersebut karena NDC setiap tahun diulas.
- Saya ingin EBT menjadi sumber utama energi masa depan. Teknologi clean coal energy dan coal gasification merupakan proses transisi energi yang diharapkan dapat membuat Indonesia mengarah kepada jalan yang benar.
- Namun, “apakah kita bergerak cukup cepat?” merupakan pertanyaan yang berbeda. Darurat iklim perlu ada di benak setiap individu. Oleh karena itu, para legislator membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik dari NGO atau pemerintah, dengan ide-ide untuk memajukan sustainability.
- Harapannya adalah bahwa target NDC dapat selalu direvisi dan dibenarkan, dan memasukkan teknologi-teknologi yang bersifat nol emisi.
- Ketika kita membahas tentang biofuel, kita juga membahas mengenai kelapa sawit. Yang harus dikoordinasikan dan dimonitor adalah supply chain dari pengelolaan kelapa sawit yang juga harus *sustainable*. Jangan sampai energi di sektor emisi semakin menurun, tetapi energi dari sektor kehutanan semakin meningkat, dimana pada akhirnya tingkat emisi sama saja seperti sebelumnya.

---

**Dr. Dino Patti Djalal**

- Sudah ada Low Carbon Development Indonesia yang dibuat oleh Bappenas, yang mencantumkan bahwa ekonomi bisa tumbuh 6% dan emisi bisa menurun sebesar 43%. Apa susahnya blueprint tersebut untuk menjadi kebijakan nasional dan tidak macet di Bappenas?

**Dr. Nirarta “Koni” Samadhi**

- Sebenarnya, hal tersebut sudah diadopsi oleh pemerintah dan menjadi salah satu referensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2040. Dari tiga skenario yang ada di dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia, yang dipilih adalah yang skenario tengah, sehingga membawa kita ke target sekarang 29%.
- Mengapa tidak ambisius? Pilihan kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan yang banyak sekali tantangannya. Contohnya *phasing out coal*. Dalam skenario yang ambisius, seharusnya dilakukan tahun lalu atau saat ini. Tidak bisa pelan-pelan lagi dan harus secara drastis dihentikan. Jika masa transisi untuk menghapus batubara akan terus dilakukan secara perlahan-lahan dalam 10 tahun kedepan, maka kita tidak dapat mencapai target NDC.
- Hal yang dibutuhkan untuk berhenti menggunakan batubara adalah kemauan politik. Keberanian politik dibutuhkan untuk mengambil kebijakan ambisius tersebut. Skenario yang dibangun oleh Bappenas (agar lebih ambisius) sebenarnya berbasis pada kebijakan yang sudah ada. Penerapannya saja yang kita masih belum kuat.

**Dr. Dino Patti Djalal**

- Para pemilik tambang batubara adalah para konglomerat-konglomerat yang banyak mendukung agenda politik dan politikus lokal. Jadi, para politikus segan untuk bersikap tegas terhadap mereka. Apakah pernyataan ini merupakan pernyataan yang akurat?

**Ibu Dyah Roro Esti Widya Putri**

- Pada tahun 2019, produksi batubara berada di 459 juta ton, sedangkan data terbaru menunjukkan produksi batubara berada di 500 juta ton. Sedangkan di dalam peraturan RUEN, kita sebetulnya mempunyai batasan yaitu 400 juta ton dalam satu tahun. Ini jelas-jelas ada sebuah pelanggaran yang telah dilakukan baik dari kementerian, pemerintah, dan juga para pelaku industri.
- Kami butuh komitmen dari semua sektor, termasuk dari pemerintah, untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan target-target yang sudah ada.
- Pemerintah mengatakan bahwa kondisi nasional kita amat sangat berbeda karena, pada dasarnya, RUEN dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5-6%. Namun karena COVID-19, pertumbuhan ekonomi kita jauh. Maka ada pendekatan-pendekatan tertentu dan bahkan saat ini sedang dibahas untuk dirubah target-target yang sebetulnya sudah disepakati sebelumnya.

- Kita butuh kerja sama lintas sektor agar transisi ini terealisasi. UU EBT dapat memonitor pelaksanaan di lapangan dan komitmen pemerintah terhadap target-target yang disepakati.

## Tanya Jawab Publik

### Dr. Dino Patti Djalal

- Seperti yang disampaikan terkait dengan pentingnya negara untuk meregulasi emisi, bagaimana kemajuan Perpres Instrumen Nilai Ekonomi Karbon?

### Ibu Tiza Mafira

- Perpres yang mengatur *carbon pricing* sangat penting. Prinsipnya adalah supaya EBT dapat bersaing, EBT harus lebih murah dan bahan bakar fosil harus lebih mahal. Perpres carbon pricing adalah upaya agar bahan bakar batubara lebih mahal dan memberikan beban moneter terhadap setiap emisi.
- Di dalam Perpres *carbon pricing*, ada empat instrumen yang dimasukkan; *carbon offset*, *results-based payment*, *carbon trading*, dan *carbon tax*. Sektor yang disasar juga banyak: energi, industri, dan pertanian. Hal yang perlu kita cemas adalah bahwa keempat instrumen tersebut harus diterapkan dengan baik dan ambisius. Misalnya, jangan sampai *carbon tax* menjadi sangat rendah sehingga tidak akan terasa dampaknya terhadap emisi. Contoh yang lainnya adalah *carbon trading* yang berdasarkan cap yang berlaku terhadap, misalnya, industri semen yang tidak bisa mengeluarkan emisi secara berlebihan sebesar sekian ratus ton per tahun. *Cap* ini harus ambisius agar Indonesia dapat berkontribusi terhadap bertahannya pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius.

### Dr. Dino Patti Djalal

- Selama ini dalam diplomasi perubahan iklim, selalu ada dikotomi antara negara maju dan negara berkembang bahwa negara maju yang harus dulu bergerak dalam isu ini. Apa kabar sekarang? Dengan kata lain, negara berkembang sudah progresif, apakah dikotomi tersebut sudah tidak ada dalam diplomasi perubahan iklim?

### Bapak Barlev Nico Marhehe

- Sekarang, saya melihat bahwa kecenderungan seluruh negara adalah untuk fokus terhadap bagaimana kita bisa mencapai Perjanjian Paris 2015. Sudah banyak negara yang berfokus kepada nol emisi atau zero emission.
- Empat negara penghasil emisi karbon terbesar dan sejak pergantian kepemimpinan di AS, banyak negara sudah mulai bergerak untuk berdiskusi dengan Amerika mengenai isu perubahan iklim.
- Indonesia dapat memainkan peran disini karena keempat negara tersebut merupakan anggota G20, untuk mendorong empat negara ini menjadi lebih agresif.



- 
- Ketika dampak perubahan iklim dirasakan, kita tidak lagi berbicara tentang dikotomi tersebut karena dampaknya akan terasa ke seluruh pihak.

#### **Dr. Dino Patti Djalal**

- AS, Uni Eropa, Inggris, dan Tiongkok akan mengurangi emisi secara drastis. Oleh sebab itu, apakah ada sebuah pemikiran yang berpendapat bahwa karena negara penghasil emisi terbesar sudah bergerak dan ambisius maka negara berkembang tidak perlu menjadi terlalu ambisius dan hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi?

#### **Dr. Nirarta “Koni” Samadhi**

- Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 beserta kewajiban dan kelengkapannya. Salah satu yang akan dilakukan secara global adalah memonitor pencapaian pengurangan emisi setiap negara, termasuk Indonesia.
- Kita bisa mengkalkulasi target AS dan Tiongkok. Namun, Indonesia tetap harus berkontribusi; kita tidak boleh berpikir untuk tidak berbuat apa-apa.

#### **Dr. Dino Patti Djalal**

- Kita harus membuat agenda iklim menjadi agenda nasional. Tetapi, sudah jelas bahwa kita adalah kaum minoritas, karena semua orang sedang mencemaskan hal yang lain diluar isu perubahan iklim. Bagaimana kita dapat mencapai ke sana?

#### **Dr. Nirarta “Koni” Samadhi**

- Itu (semua orang peduli terhadap perubahan iklim) adalah mimpi kita semua. Yang harus kita lakukan adalah membuat krisis iklim menjadi krisis pribadi. Hal seperti membuat dan mendorong orang-orang untuk menandatangani petisi FPCI merupakan contoh baik untuk mengubah isu krisis iklim menjadi krisis pribadi. Ketika isu ini menjadi personal sehingga menjadi norma, dan krisis iklim adalah tanggung jawab kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita.

#### **Dr. Dino Patti Djalal**

- Kita melakukan tindakan kecil dari FPCI dengan petisi ini, dan ada bisnis atau pihak lain yang sedang melakukan tindakan kecil lainnya. Ada sebuah teori bahwa semua tindakan kecil tersebut tidak berpengaruh pada perubahan total kepada ekonomi hijau dengan karbon yang rendah. Bagaimana menurut kalian?

#### **Ibu Tiza Mafira**

- Tindakan individu memang terkesan kecil. Namun, yang perlu diperhatikan bagi setiap individu yang ingin melakukan perubahan individu adalah kontribusinya terhadap sistem. Kita semua harus berambisi agar perubahan individu kita adalah upaya untuk mengubah sistem. Kita mau investasi, namun investasi hijau; pekerjaan, pekerjaan hijau dsb.

- 
- Hal itu dapat digaungkan dengan kebijakan-kebijakan yang menyerempet ke arah tersebut. Misalnya, *fiscal stimulus* adalah sebuah momentum untuk melakukan reset. Ekonomi sedang resesi dan semua negara sedang membahas cara pemulihan, diharapkan caranya adalah cara yang lebih hijau dan sustainable.
  - Saat ini, elemen yang berkaitan dengan kegiatan dan perlindungan lingkungan dalam *fiscal stimulus* Indonesia masih baru mencapai 0,4%. Angka masih sangat kecil.
  - Baru-baru ini, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani terpilih menjadi co-chair koalisi Menteri Keuangan untuk Climate Action, yang akan membahas tentang *green stimulus*. Hal tersebut merupakan momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan bahwa *fiscal stimulus* kita juga hijau, melalui dukungan kepada pemerintah dan kerja-sama setiap pihak. Hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar.

### **Barlev Nico Marhehe**

- Menjadi PR kita untuk mencari cara agar gerakan ini meluas, dimana petisi FPCI ini merupakan satu upaya.
- Di UNEP, kami juga memiliki beberapa pendekatan yang tidak biasa agar kesadaran dari setiap orang bertumbuh dan gerakan-gerakan seperti ini dapat berdampak. Salah satu contohnya adalah Interfaith Rainforest Initiative, dimana kita menggunakan ajaran agama untuk menjaga lingkungan kehutanan. Upaya seperti ini dapat diperluas sehingga ajaran-ajaran dan kebijaksanaan agama bisa menjadi pendorong bagi kita untuk bergerak lebih jauh; bahwa dengan kita menjaga lingkungan, kita sedang melaksanakan ajaran yang kita anut.

### **Dr. Dino Patti Djalal**

- Paradigma baru di dunia adalah *low carbon* artinya *more jobs, profit, dan growth*. Paradigma ini masih sangat aneh di Indonesia, namun saya percaya ini akan menjadi paradigma internasional yang akan mewarnai diskusi politik, ekonomi, sosial dan teknologi di seluruh dunia. Indonesia harus menjadi bagian besar dari diskusi-diskusi tersebut dalam lingkup ruang internasional.